

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai sinergitas Kominda kota Surabaya dalam mencegah potensi konflik pasca aksi teror bom 3 Gereja pada tahun 2018, mendalami faktor-faktor yang menghambat dan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam hubungan sinergitas tersebut serta diharapkan dapat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah bersama aparat intelejen TNI, POLRI dan BIN di kota Surabaya terkait dalam merumuskan kebijakan mengenai deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap potensi konflik melalui sinergitas Kominda di kota Surabaya, serta dapat menjadikan pertimbangan Kominda secara umum membantu mewujudkan pencegahan konflik yang tepat sasaran

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, akan terdiri atas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka akan berisi mengenai pembahasan atas konsep hingga teori dari para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

Selain itu, bab ini juga akan disertai dengan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan pedoman Peneliti untuk membandingkan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, serta kerangka berpikir sebagai alur logika berpikir yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinergitas

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Sinergi (*Synergy*) adalah bentuk Kerjasama *Win-win* yang dihasilkan melalui Kolaborasi masing-masing Pihak tanpa adanya Perasaan Kalah. Dr. Stephen R. Covey mengartikan sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar” dalam bukunya *7 Habits of Highly Effective People*, jika $1 + 1 > 3$, maka itulah yang disebut “*Synergy*”. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Konsep ber-Sinergi diantaranya adalah berikut ini:

- a. Ber-Orientasi pada Hasil dan Positif.
- b. Perspektif beragam menggantikan atau melengkapi Paradigma.
- c. Saling Bekerjasama dan ber-Tujuan Sama serta adanya Kesepakatan.
- d. Sangat Efektif diusahakan dan merupakan suatu Proses.

Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan Kesepakatan dan menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.

Indikator untuk menganalisis sinergitas dalam penelitian ini juga mengacu pada Doctoroff (1977: 76), yakni syarat utama bagi suatu sistem

sinergi yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas.

Sinergitas dianalisis menggunakan indikator dari Doctoroff yakni :

- a. **Komunikasi yang efektif.** Komunikasi dapat berjalan efektif dengan adanya komunikasi dua arah dan saling timbal balik yang menandakan seluruh pihak memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi terjadi secara rutin melalui tatap muka maupun telepon atau grup *whatsapp*.
- b. **Feedback yang cepat.** Komunikasi yang efektif menimbulkan adanya *feedback* yang cepat diantarastakeholders.
- c. **Kepercayaan.** Saling percaya harus dibuktikan dengan adanya keterbukaan, saling berbagi sumber daya, saling menerima, memberikan dukungan, dan saling bekerjasama.
- d. **Kreativitas.** Bentuk kreativitas yang diharapkan dari teori ini untuk sinergitas yaitu dihasilkan sebuah bentuk pola dan operasi kerjasama dilapangan yang bertujuan menghasilkan tindakan cegah dini yang maksimal dan berkesinambungan.

Sinergitas dapat diartikan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Menurut A.F Stone James dalam Soekanto (2009 : 212-213) bahwa sinergitas adalah hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi akan menghasilkan tiga tingkatan kerja sama, meliputi :

- a. **Defensive.** Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif / defensif;
- b. **Respectfull.** Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai;
- c. **Sinergistis.** Dengan kerja sama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat

sinergisitas yang berarti kerja sama yang terjalin akan menghasilkan output yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

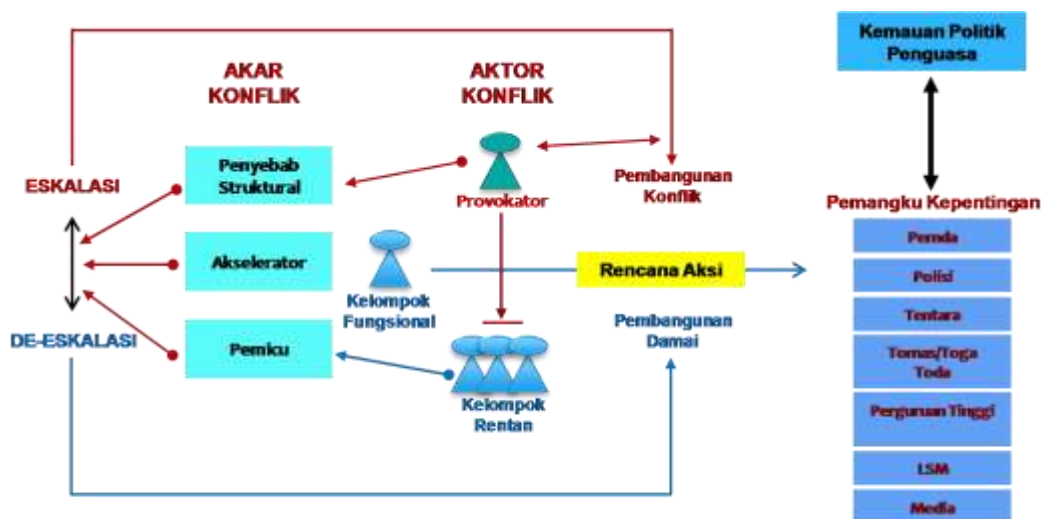
Teori sinergitas ini merupakan instrument utama dari penelitian ini yaitu "*mother teory*" yang sangat penting dalam proses jalannya hubungan koordinasi, kerjasama, dan komunikasi Kominda Kota Surabaya dalam deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terjadinya konflik. Sehingga instansi intelijen ini tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan walaupun bersumber dari berbagai tempat. Teori ini di gunakan untuk mewujudkan tujuan bersama, dimana pentingnya dilakukan satu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi dengan posisi secara serasi, seimbang, dan selaras sehingga terwujudnya sinergitas antar institusi keamanan dalam menjaga Keamanan Nasional.

2.1.2 Teori CEWERS (*Conflict Early Warning and Early Response System*)

Sistem peringatan dan tanggapan dini konflik (STPDK), *Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)* adalah salah satu aktifitas penting yang bisa dilakukan dalam tahap pencegahan konflik. *Tools*-nya telah dibuat oleh Ichsan Malik dan Institut Titian Perdamaian, dan telah diuji coba di Maluku, Kalimantan Barat, Poso dan Myanmar. Yang terangkum dalam kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik untuk mendeteksi dini konflik dan respon dini dalam 5 komponen utama yaitu :

- a. Komponen eskalasi-deskalasi**, menggambarkan situasi potensi konflik meningkat/meluas atau tidak di tengah masyarakat.
- b. Komponen faktor konflik**, merupakan element yang akan menjadi prakondisi yang mendorong meningkatnya eskalasi konflik.
- c. Komponen aktor konflik**, yaitu suatu komponen yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap eskalasi konflik.

- d. **Komponen pemangku kepentingan**, yaitu elemen-elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik.
- e. **Komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian**, yaitu unsur yang berperan penting dengan mengeluarkan aturan agar konflik tidak membara dan menyebar.



(Sumber: Ichsan Malik 2017. Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian)

Gambar 2.1 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Adapun tujuan pembuatan SPTDK, antara lain :

- Untuk mengidentifikasi dan menilai indikator-indikator konflik yang paling menonjol.
- Menilai kemungkinan kecenderungan dan skenario konflik.
- Mengidentifikasi strategi dan kesempatan bagi perdamaian.
- Menyumbangkan analisis situasional yang berimbang, yang didasarkan pada interaksi antar berbagai faktor konflik dan perdamaian.

- e. Menerjemahkan kesimpulan tersebut menjadi pilihan-pilihan tanggapan dan strategi tindakan untuk aktor lokal, regional, dan internasional.

Galtung (1996) menyarankan untuk memahami konflik secara menyeluruh, maka anggaplah konflik sebagai suatu penyakit. Untuk dapat menentukan penyakit yang sebenarnya kita harus dapat membedakan mana yang sekedar gejala-gejala dan mana yang menjadi sumber penyakit. Harus dilakukan diagnosis terlebih dahulu baru kita menentukan kemungkinan obat-obatnya, serta baru dilakukan *treatment* tahap demi tahap. Melakukan identifikasi pada potensi konflik yang akan terjadi, penting untuk memberi pengaruh pada strategi pencegahan konflik yang akan dipilih serta perlakuan terhadap kelompok yang akan bersengketa. Kerangka pencegahan konflik sangat di butuhkan untuk memberikan kontribusi untuk pencegahan konflik. Karena, kunci utama dalam pencegahan dan penanganan konflik terletak pada kecermatan dalam mendeteksi konflik kemudian melakukan upaya untuk melakukan deeskalasi konflik. Dibutuhkan adanya suatu ketajaman dalam analisis dari faktor penyebab konflik yang dilanjutkan dengan kemampuan untuk memperkuat aktor fungsional. Kemampuan dalam menjalin koordinasi yang efektif dengan semua elemen pemangku kepentingan dibutuhkan untuk dengan segera konflik dapat di cegah.

Melihat dari kasus bom 3 gereja di kota Surabaya rasanya ada yang salah dengan sistem peringatan dini yang diterapkan di Indonesia karena tidak berdampak bagi warga. Philip Zimbardo, menjelaskan ada beberapa syarat agar sistem peringatan dini terhadap pencegahan konflik berjalan secara efektif yaitu :

- a. Sumber yang mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi konflik harus kredibel, dipercaya dan memiliki keahlian dibidang pencegahan dan penanganan konflik.

- b.** Peringatan dini terhadap potensi konflik harus terfokus pada kejadian spesifik. Sehingga dapat mengantisipasi apa yang bisa dilakukan masyarakat pasca serangan bom.
- c.** Sistem peringatan dini dalam pencegahan konflik hendaknya didesain untuk memotivasi masyarakat bergerak sebagai kelompok.
- d.** Sistem peringatan dini haruslah berisi satu set tindakan yang bisa dilakukan masyarakat, semacam Prosedur Operasi Standar (SOP).

Peneliti menggunakan Teori *CEWERS* dalam penelitian ini sebagai teori utama untuk meneliti bagaimana tindakan pencegahan potensi konflik yang dilakukan Kominda kota Surabaya pasca bom 3 Gereja, langkah-langkah apa yang dilakukan baik secara hukum, keamanan atau psikologi kepada masyarakat. Sehingga akan muncul suatu analisa tingkat efektif dan efisien sinergitas Kominda dalam pencegahan potensi konflik tersebut.

2.1.3 Teori Konflik Sosial

Konflik merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, 2001).

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri

Berkaitan dengan konflik, Neil J. Smelser (Muchtar, Usman, dan Trijono, 2001) menyatakan bahwa Teori konflik modern membuat asumsi sebagai berikut:

- a. Yang utama pada masyarakat yang akan datang adalah perubahan, konflik, dan kekerasan.
- b. Struktur masyarakat didasarkan pada dominasi oleh beberapa kelompok terhadap kelompok lain.
- c. Masing-masing kelompok dalam masyarakat memiliki kecenderungan perhatian umum, apakah para anggotanya memahami atau tidak.
- d. Ketika orang-orang memahami kecenderungan umumnya, mereka mungkin membentuk kelas social.
- e. Intensitas konflik kelas bergantung pada adanya kepastian politik dan kondisi sosial.

Sementara, Dahrendorf dalam Johnson (1986) menjelaskan bahwa:

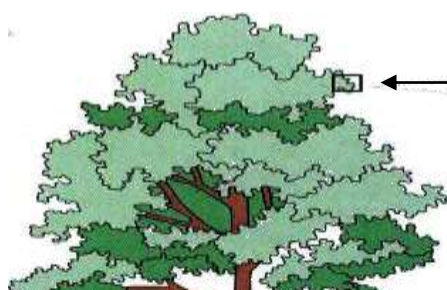
- a. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial ada di mana-mana.
- b. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik sosial ada di mana-mana.
- c. Setiap elemen dalam masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
- d. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Baik Smelser (Muchtar, Usman dan Trijono, 2001) maupun Dahrendorf (Johnson, 1986) menyatakan bahwa konflik sosial terjadi antara dua kelompok yang berbeda kepentingan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang ada. Satu kelompok berusaha untuk mengendalikan kelompok yang lainnya. Ketika satu kelompok berusaha mengendalikan kelompok lain dengan berbagai cara, selalu melibatkan kekuasaan dan

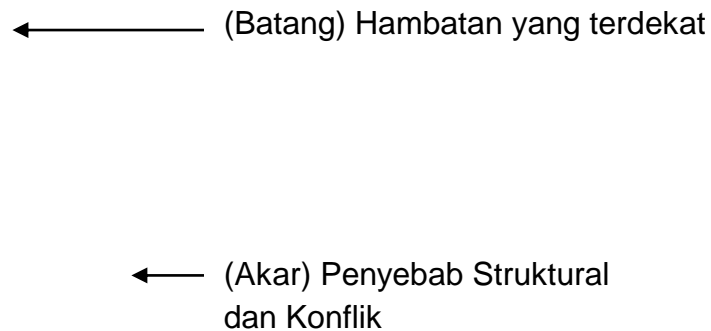
wewenang, maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Melihat kasus bom Surabaya 2018 adalah salah satu tindakan ledakan kebencian oleh sekelompok orang di tengah masyarakat yang berakibat dapat menimbulkan konflik sosial.

Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 2 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik dengan melalui memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Sebenarnya konsep ini sudah dikenal dengan CEWS (*Conflict Early Warning System*) dan ditemukan pertama kali pada saat terjadinya Perang Dingin. Konsep CEWS digunakan oleh intelijen militer untuk memprediksi munculnya potensi penyerangan *ballistic* oleh lawan. Melihat kasus ini, dapat membuktikan bahwa peranan intelijen sangat penting dalam melaksanakan peringatan dini untuk mendeteksi adanya ancaman di masyarakat berupa konflik sosial.

Untuk dapat menganalisis sebuah konflik maka salah satu cara atau instrument yang digunakan adalah dengan Pohon Konflik. Menurut Bambang Wahyudi dalam buku “ Penanganan Konflik. Pendekatan Kearifan Lokal” (2018) bahwa Pohon Konflik berfokus pada anatomi konflik dan model analisis konflik Glasl dimana titik beratnya adalah dinamika konflik atau situasi eskalasi dan deeskalasi. Dijelaskan pula bahwa sebagaimana anatomi pohon yang terdiri dari *akar* menggambarkan penyebab struktural dari konflik (contoh : ketidakadilan dan pemerintah yang lemah), *batang* yang merupakan hambatan terdekat (contoh: masalah agraria, kesenjangan ekonomi dalam suatu wilayah), dan *cabang* sebagai indikator/gejala konflik yang terlihat di permukaan (contoh : perbedaan SARA dan perbedaan partai politik).



(Cabang) Indikator dipermukaan



Gambar 2.2 Teori Pohon Konflik

Peneliti menggunakan Teori Konflik Sosial dalam penelitian ini sebagai teori pendukung, karena permasalahan-permasalahan yang akan di hadapi oleh Kominda Kota Surabaya pasca Bom Gereja tahun 2018 adalah potensi konflik yang terjadi di masyarakat, dimana akan terjadi pergesekan-pergesekan kepentingan dan pendapat dari kelompok yang menjadi korban bom terhadap peranana Pemerintah dalam keamanan nasional yang mengerucut kepada keamanan manusia.

2.1.4 Teori Intelijen

Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris "*Intelligence*" (kata benda), yang secara harfiah berarti kecerdasan (pengertian umum). Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Intelijen dapat kita bedakan yaitu intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai organisasi dan sebagai kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lain.

Donny Gahril Adian (2013) mengatakan bahwa intelijen harus berlomba dengan materialisasi ancaman yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, artinya harus mampu mengumpulkan informasi secara cepat

untuk mendeteksi dini sebuah ancaman terhadap keamanan nasional. Menurut Hendropriyono (2013), masalah nasional merupakan *domain* dari pemerintah negara yang membutuhkan kerja keras dari intelijen untuk menjamin keamanannya. Teori intelijen mengandung roh kerja yaitu keamanan nasional yang kerap dipertentangkan dengan kebebasan individu yang merupakan sendi-sendi demokrasi, kita perlu memahami transformasi konsep keamanan yang bukan keamanan rezim, melainkan keamanan insani.

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, kegiatan intelijen sering dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan, yaitu melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan dilandasi oleh adanya bahan-bahan keterangan yang ada atau yang dicari. Sebagai contoh dapat dikemukakan adanya satu peribahasa yang berbunyi "*sedia payung sebelum hujan*". Pentingnya membawa payung pada saat bepergian merupakan suatu keputusan yang diambil karena dilandasi adanya fakta bahwa pada saat itu sedang musim hujan, sehingga bepergian yang dilakukannya berjalan lancar, dengan demikian tujuan yang diinginkan dapat dicapai tanpa hambatan. Intelijen harus bergerak secara cepat (*velox*) dan tepat (*exactus*) dalam melaksanakan kegiatan untuk mencari jawaban terbaik guna mendapatkan solusi terbaik, memperoleh jawaban terbaik itu maka pengorganisasian intelijen menuntut segala yang terbaik dalam segenap aspeknya. Sulit untuk mendapatkan jawaban terbaik bila organisasi intelijen tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi dasarnya sekalipun.

Intelijen pada kehidupan bernegara senantiasa tidak terlepas dari adanya ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), sehingga dituntut memiliki sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan penyelidikan, kemampuan pengamanan dan kemampuan penggalangan. Adapun yang dimaksud dengan ATHG ialah :

- a. **Ancaman** ialah segala usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan secara konsepsional dari sudut kriminil atau kemampuan.
- b. **Tantangan** ialah merupakan usaha yang menggugah kemampuan.
- c. **Hambatan** ialah suatu usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijaksanaan, yang tidak bersifat konsepsional serta berasal dari diri sendiri.
- d. **Gangguan** ialah suatu usaha dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijaksanaan, yang tidak bersifat konsepsional.

Intelijen pada kehidupan bernegara senantiasa tidak terlepas dari adanya ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), sehingga dituntut memiliki sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan penyelidikan, kemampuan pengamanan dan kemampuan penggalangan. Itulah gambaran umum tentang intelijen, baik dalam keadaan sehari-hari dalam lingkup terbatas maupun dalam kehidupan berskala besar yaitu negara.

Adapun badan-badan intelijen yang ada di Indonesia, baik yang bersifat strategis maupun taktis mempunyai tugas pokok sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Tugas pokok badan-badan intelijen tersebut adalah menyediakan intelijen yang dibutuhkan satuan atasannya untuk keperluan penentuan suatu keputusan atau kebijaksanaan pimpinan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan negara dan bangsa serta pengamanan pembangunan nasional. Badan-badan intelijen yang berada atau bernaung di bawah satuan atasan departemental atau setingkat adalah bersifat strategis, sedangkan badan-badan intelijen yang berada pada satuan bawahan departemental atau setingkat adalah bersifat taktis. Badan-badan intelijen Angkatan, Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan dan lain-lain yang setingkat dapat digolongkan sebagai Badan Intelijen Strategis. Sedangkan badan-badan intelijen pada satuan-satuan bawahan

seperti badan-badan intelijen yang ada pada satuan-satuan militer kecil atau lainnya yang setingkat dapat digolongkan sebagai Badan Intelijen Taktis.

Dari kedua teori dan penjelasan tentang intelijen diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan fokus membahas tentang fungsi Intelijen yaitu meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan, mengolah, menafsirkan dan menyampaikannya kepada pihak pimpinan yang berwenang pada semua tingkatan dalam peringkat pemerintahan, mulai dari tingkat nasional sampai regional dan lokal, untuk digunakan bagi penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan tindakan secara diperhitungkan terlebih dahulu oleh masing-masing yang bersangkutan, sesuai dengan bidang tanggung jawab dan masalahnya. Fungsi tersebut tersebut antara lain :

- a. **Penyelidikan** mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer. Pada tingkat nasional fungsi ini dilakukan secara terus menerus, di dalam dan di luar negeri, pada umumnya secara terbuka tetapi dimana perlu tertutup. Pada tingkat regional dan lokal dilakukan secara terus menerus, baik secara terbuka maupun tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus.
- b. **Pengamanan** ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan sabotase dan untuk melakukan penggalangan terhadap personil pihak kita sendiri serta menumpas usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pihak lawan/musuh yang melakukan spionase, sabotase dan penggalangan.
- c. **Penggalangan** ialah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah dengan sarana-sarana intelijen, khusus untuk membuat, menciptakan dan merubah suatu kondisi di daerah atau kelompok tertentu, dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan atau sesuai kehendak atasan yang berwenang untuk menghilangkan hambatan-hambatan

dalam rangka mendukung kebijaksanaan yang akan ditempuh /akan ditempuh oleh pimpinan. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang IPOLEKSOSBUDMIL, atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

Teori Intelijen ini digunakan peneliti sebagai dasar pedoman dalam melaksanakan wawancara dan observasi lapangan, juga sebagai bagian dari subyek penelitian terhadap nara sumber bahwa sampai dimana peranan intelijen dalam deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini potensi konflik yang terjadi di kota Surabaya. Bahwa peranan intelijen merupakan penggerak utama Kominda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

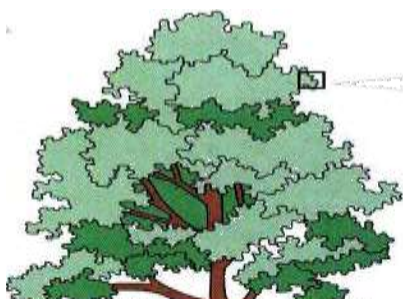
2.1.5 Teori Terorisme

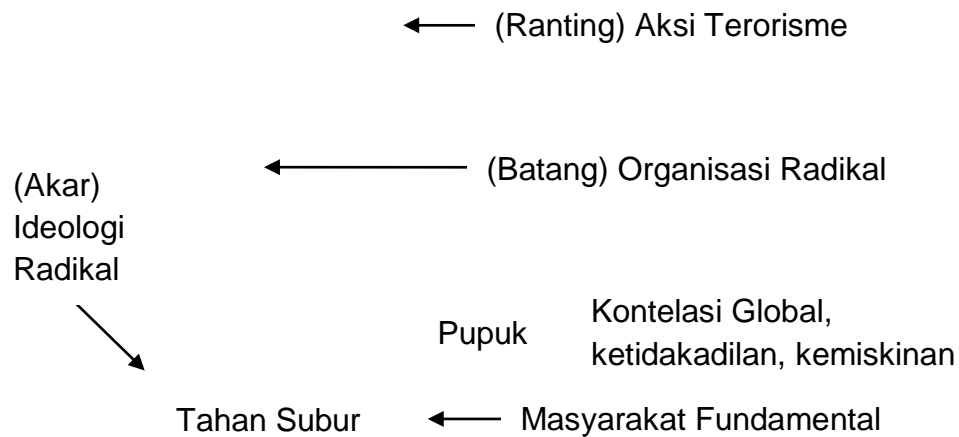
Terorisme didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat dengan ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan sehingga dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)(Glose, 2014).

Terorisme, merupakan salah ancaman nyata yang di hadapi bangsa Indonesia saat ini. Berakar dari gerakan radikal baik ideologi maupun paham berlandaskan agama berkembang menjadi ancaman teror yang mengancam kehidupan masyarakat secara luas sehingga membahayakan bagi keamanan dan pertahanan negara. Terorisme dikategorikan sebagai peperangan asimetris dimana lebih mengutamakan tekanan psikologi berupa teror dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan bermaksud menakuti korbannya. Dampak serangan teror tidak hanya terbatas dalam bentuk fisik, namun secara strategis ia menimbulkan dampak dominan dan tantangan lebih luas pada politik dalam dan luar negeri, kondisi sosial,

ekonomi, dan jelas pada keamanan Indonesia (Muhammad Ahsan, 2010). Masalah terorisme bagi Indonesia merupakan isu politik kontemporer yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Berdasarkan pengungkapan aksi teror selama ini diketahui bahwa Indonesia tidak hanya menjadi target terorisme baik bersifat domestik maupun internasional, namun juga dijadikan daerah perekrutan pelaku terorisme. Ahsan juga menerangkan bahwa dari aksi pengeboman yang lebih sering diekspos hingga propaganda, perekrutan, perampokan, dan pergeseran sasaran *far enemy* menjadi perlawanan kepada pemerintah Indonesia dan perangkatnya

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup ditanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup dilahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan. Hendropriyono menyatakan bahwa Terorisme di Indonesia bak patah tumbuh hilang berganti. Jika para teroris di umpamakan sebagai dedaunan, maka yang mengikat mereka dalam susunan organisasi adalah dahan, ranting, cabang, dan batang dari suatu pohon. Para teroris layaknya daun-daun dari sebatang pohon yang selalu bertunas dan berkembang kembali dengan subur, setiap kali daun-daun terdahulu gugur ataupun ditebas. Untuk memahami terorisme layak kiranya jika membangun suatu model analitik melalui sebuah pohon yang disebut "Pohon Terorisme",





Gambar 2.3 Teori Pohon Terorisme

Teori Terorisme digunakan peneliti untuk menggambarkan situasi yang membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teroris. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pengawasan dan kontrol wilayah dengan menambah kualitas kemampuan pertahanan dan keamanan serta memperkuat peran instansi intelijen dengan meningkatkan kemampuan aparat polisi, TNI, dan intelejen serta sumber daya manusia (keahlian). Teori ini digunakan peneliti, karena studi kasus dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian adalah aksi terorisme berupa aksi bom tempat Ibadah di Surabaya.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Dedi Prasetyo (2016) dalam penelitian tesis berjudul “Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”. Dengan hasil penelitian tentang, (1) Upaya meningkatkan sinergi antara TNI dan POLRI dalam deradikalisasi menghadapi perkembangan terorisme di Indonesia, dapat ditandai dengan meningkatnya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang erat serta terintegrasi, (2) Program Deradikalisasi harus

dilaksanakan secara sinergi antara TNI dan POLRI sebagai komponen utama dan juga seluruh komponen bangsa lainnya sebagai pendukung untuk meningkatkan kemampuan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah kepada aksi terorisme. Dengan yang digunakan yaitu Teori Sinergi, Teori Terorisme, dan Teori Radikalisme. Adapun kesamaan penelitian adalah metode kualitatif, dan sinergitas antara dua instansi yang memiliki kemampuan intelijen dalam cegah dini aksi terorisme. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini untuk mencegah potensi konflik di kota Surabaya.

Takkas Gultom (2014) dalam penelitian tesis berjudul “Deteksi Dini Pergerakan Terorisme Melalui Pemberdayaan Intelijen Kodim 502/Jakarta Utara Sebagai Upaya Pencegahan Aksi-Aksi Terorisme”. Hasil penelitian yaitu, (1)Pelaksanaan tugas deteksi dini kurang mendalami teori-teori penyelidikan sehingga penerapan dalam prakteknya terbatas dalam teknik dan metode, (2)Babinsa yang kaya informasi tentang situasi wilayah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber informasi. Teori yang digunakan yaitu Teori Intelijen, Teori terorisme dan *Positive Clandestine Intelligence (PCI)*, *Early Warning System Terrorism*, *Intelligence Early Warning System*. Adapun kesamaan adalah metode kualitatif, dan melakukan pencegahan terorisme dengan peranan intelijen, sedangkan perbedaan yaitu Takes Gultom menggunakan aparat Kodim 0502/jakarta Utara, sedangkan peneliti menggunakan Kominda yang ada diwilayah kota Surabaya.

Wulanda Anjawari (2014) dalam penelitian tesis ini berjudul “Optimalisasi Peran Komunitas Intelijen Daerah dalam Deteksi Dini Konflik Komunal di Kota Pontianak”. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan tugas deteksi dini konflik komunal melalui optimalisasi peran Kominda dilakukan dengan perbaikan kualitas koordinasi melalui rapat rutin Kominda dan pertemuan informal namun belum berjalan dengan baik dan optimal. Teori yang digunakan yaitu Teori Peran dan Teori Koordinasi. Adapun kesamaan adalah metode kualitatif, dan melakukan pencegahan konflik di masyarakat

dengan peranan Kominda, Wulanda menggunakan Kominda di Kota Pontianak, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan Kominda di Kota Surabaya.

Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	TEORI/KONSEP	HASIL	PERSAMAAN/ PERBEDAAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dedi Prasetyo (2016)	“Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi, • Terorisme, • Radikalisme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya meningkatkan sinergi antara TNI dan POLRI dalam deradikalisasi menghadapi perkembangan terorisme di Indonesia, dapat ditandai dengan meningkatnya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang erat serta terintegrasi. • Program Deradikalisasi harus dilaksanakan secara sinergi antara TNI dan POLRI sebagai komponen utama dan juga seluruh komponen bangsa lainnya sebagai pendukung untuk meningkatkan kemampuan daya cegah dan daya tangkal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesamaan adalah metode kualitatif, dan Sinergitas antara dua instansi yang memiliki kemampuan intelijen dalam cegah dini aksi terorisme. • Perbedaannya yaitu penelitian ini untuk mencegah potensi konflik.

1	2	3	4	5	6
				masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah kepada aksi terorisme.	
2.	Takkas Gultom (2014)	“Deteksi Dini Pergerakan Terorisme Melalui Pemberdayaan Intelijen Kodim 0502/Jakarta Utara Sebagai Upaya Pencegahan Aksi-Aksi Terorisme”	<ul style="list-style-type: none"> • Intelijen, • Terorisme, • <i>Positive Clandestine Intelligence (PCI), Early Warning System Terrorism, Intelligence Early Warning System.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas deteksi dini kurang mendalami teori-teori penyelidikan sehingga penerapan dalam prakteknya terbatas dalam teknik dan metode. • Babinsa yang kaya informasi tentang situasi wilayah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesamaan yaitu metode kualitatif, dan melakukan pencegahan terorisme dengan peranan intelijen. • Perbedaannya menggunakan aparat Kodim 0502/Jakut dan penelitian ini menggunakan Kominda dikota Surabaya.

1	2	3	4	5	6
3.	Wulanda Anjawari (2014)	"Optimalisasi Peran Komunitas Intelijen Daerah dalam Deteksi Dini Konflik Komunal di Kota Pontianak"	<ul style="list-style-type: none"> • Peran, • Koordinasi. 	Pelaksanaan tugas deteksi dini konflik komunal melalui optimalisasi peran Kominda dilakukan dengan perbaikan kualitas koordinasi melalui rapat rutin Kominda dan pertemuan informal namun belum berjalan dengan baik dan optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesamaan adalah metode kualitatif, dan melakukan pencegahan konflik di masyarakat dengan peranan Kominda. • Perbedaannya Wulanda menggunakan Kominda di Kota Pontianak, sedangkan penelitian ini menggunakan Kominda di Kota Surabaya.

2.3 Kerangka Berpikir

